

2.4 Dampak Kehilangan Kewarganegaraan

1.Hak dan Kewajiban Individu:

Kehilangan kewarganegaraan dapat memberikan dampak signifikan terhadap hak dan kewajiban individu. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan meliputi:

a.Hak Asasi Manusia: Individu yang kehilangan kewarganegaraan mungkin menghadapi tantangan dalam melindungi hak-hak asasi manusia mereka, seperti hak atas kehidupan keluarga dan kebebasan bergerak atau berpergian.

b.Hak Politik: Kewarganegaraan seringkali merupakan syarat untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum. Kehilangan kewarganegaraan dapat mengakibatkan hilangnya hak suara dan keterlibatan politik.

c.Proteksi Diplomatik: Kehilangan kewarganegaraan dapat mengurangi tingkat proteksi diplomatik yang diberikan oleh negara kepada warganya di luar negeri.

d.Akses ke Pelayanan Publik: Beberapa negara mengaitkan kewarganegaraan dengan akses ke layanan publik tertentu, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Kehilangan kewarganegaraan dapat membatasi akses ini.

2.Aspek Sosial dan Ekonomi:

a.Isolasi Sosial: Kehilangan kewarganegaraan dapat menciptakan isolasi sosial, karena individu mungkin kehilangan identitas yang melekat pada kewarganegaraan mereka. Ini dapat memengaruhi keterlibatan dalam masyarakat dan integrasi sosial.

b.Kesulitan Ekonomi: Kewarganegaraan sering kali terkait dengan hak ekonomi tertentu, seperti hak untuk bekerja dan

memiliki properti. Kehilangan kewarganegaraan dapat membatasi akses ke peluang ekonomi dan menciptakan ketidakpastian finansial.

c.Mobilitas Global: Beberapa negara memberikan keuntungan ekonomi tertentu kepada warganya, seperti akses bebas visa atau kemudahan perdagangan. Kehilangan kewarganegaraan dapat mengurangi mobilitas global dan kesempatan bisnis.

d.Kesejahteraan Sosial: Kewarganegaraan sering terkait dengan hak-hak kesejahteraan sosial tertentu seperti Pendidikan Gratis atau Terjangkau, Perlindungan Sosial dan Pelayanan Kesehatan. Kehilangan kewarganegaraan dapat berdampak pada akses terhadap program-program ini.

2.5 Perlindungan untuk orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan

Mengatasi keadaan tanpa kewarganegaraan masih menjadi masalah besar di abad 21 ini. Diperkirakan saat ini terdapat 12 juta orang yang tidak berkewarganegaraan di seluruh dunia.

Pada saat yang sama, beberapa orang yang tidak berkewarganegaraan adalah juga orang yang termasuk sebagai pengungsi meskipun kebanyakannya tidak. Orang-orang tanpa kewarganegaraan yang termasuk sebagai pengungsi berhak akan perlindungan internasional yang disahkan oleh Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi.

-Konvensi 1951 berdasar pada suatu asas pokok: tidak satupun orang yang tidak berkewarganegaraan boleh diperlakukan lebih buruk dari seorang asing manapun yang berkewarganegaraan. (“Konvensi 1951”).

-Konvensi 1954 menjamin hak akan bantuan administrasi kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan (Pasal 25), suatu hak akan identitas diri dan dokumen perjalanan (Pasal 27 dan 28) dan mengecualikan mereka dari persyaratan-persyaratan timbal balik (Pasal 7).

2.6 Contoh kasus hilangnya status Kewarganegaraan yang di alami oleh Tom Iljas

Tom Iljas adalah salah satu anggota Diaspora Indonesia di Swedia. Anak Siti Mawar dan Ilyas Raja Bungsu dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, ini mendapat tugas belajar oleh pemerintah Sukarno ke Peking Institute of Agricultural Mechanization, (Institut Mekanisasi Pertanian yang ada di cina). Berangkat tahun 1960, Tom Iljas lulus dan kembali ke Indonesia tahun 1965, tepat ketika huru-hara sedang berguncang di Indonesia.

Di tengah ketidaktahuan apa yang terjadi di negerinya, tiba-tiba paspornya ditahan imigrasi. Tom Iljas dicekal karena dikaitkan dengan peristiwa 30 September 1965. Terusir dari negerinya, Tom menggelandang tanpa kewarganegaraan. Setelah lebih dari 18 tahun, Tom Iljas akhirnya diterima sebagai warga negara Swedia.

Tom yang rindu Tanah Air bisa pulang kampung setelah terjadi reformasi di negeri ini.

Sampai sini aja

Hampir tiap tahun ia sebenarnya pulang kampung. "Tom pulang untuk berkunjung ke rumah keluarganya dan ziarah ke makam ibunya," kata Wendra Rona Putra, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Padang, kepada Tempo, Sabtu, 17 Oktober 2015.

KESIMPULAN

Kehilangan kewarganegaraan bukanlah sekadar proses administratif, tetapi melibatkan berbagai konsekuensi yang meluas. Pada tingkat individu, dampaknya dapat dirasakan pada hak asasi manusia, hak politik, proteksi diplomatik, dan akses terhadap layanan publik. Hal ini menciptakan tantangan yang signifikan, termasuk isolasi sosial dan kesulitan ekonomi bagi individu yang kehilangan kewarganegaraannya. Secara sosial dan ekonomi, kehilangan kewarganegaraan dapat menciptakan isolasi dan kesulitan finansial. Kesulitan ini melibatkan hak ekonomi, mobilitas global, dan akses terhadap program-program kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap individu yang kehilangan kewarganegaraan menjadi esensial untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan mereka tidak terpinggirkan secara tidak adil.